

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBINA ORGANISASI
KEPEMUDAAN REMAJA MESJID UNTUK MEMBENTUK
PERILAKU GENERASI MUDA ISLAM**

**(Studi Kasus Di Desa Aman Damai
Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat)**

SKRIPSI

**DISUSUN
OLEH:**

**SULIADI
NPM. 128510048**



FAKULTAS ISIPOL

**PROGRAM STUDI KEPEREMINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2016**

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBINA ORGANISASI
KEPEMUDAAN REMAJA MESJID UNTUK MEMBENTUK
PERILAKU GENERASI MUDA ISLAM**

**(Studi Kasus Di Desa Aman Damai
Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat)**

SKRIPSI

Skripsi Sebagai Salah Satu Diantara Beberapa Syarat Untuk Dapat
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

**DISUSUN
OLEH:**

**SULIADI
NPM. 128510048**

**PROGRAM STUDI KEPEREMINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2016**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Peranan Pemerintah Desa Dalam Membina Organisasi
Kepemudaan Remaja Mesjid Untuk Membentuk Perilaku
Generasi Muda Islam (Studi Kasus Di Desa Aman Damai
Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat)

Nama mahasiswa : Suliadi
NPM : 12 851 0048
Program Studi : Kepemerintahan

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

WIKULTAS ISPO

(Drs M. Aswin Hasibuan, MAP)

(Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum)

Mengetahui

Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Tanggal Lulus :

**PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI
DAN SUMBER INFORMASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suliadi

NPM : 12 851 0048

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Peranan Pemerintah Desa Dalam Membina Organisasi Kepemudaan Remaja Mesjid Untuk Membentuk Perilaku Generasi Muda Islam (Studi Kasus Di Desa Aman Damai Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat)”** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan oleh penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir dalam skripsi ini.

Medan, November 2016

Suliadi
NPM 12 851 0048



ABSTRAK

Generasi muda merupakan tulang punggung dan harapan bagi bangsa dan negara karena kelak menjadi pelanjut tongkat estafet pembangunan nasional di masa yang akan datang.

Rumusan masalah: 1). bagaimanakah peran Pemerintah Desa dalam pembinaan moral remaja di Desa Aman Damai Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat? 2). Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan yang mendukung Pemerintah Desa dalam pembinaan moral remaja di Desa Aman Damai Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat?

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Desa dalam pembinaan moral remaja serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung Pemerintah Desa dalam pembinaan moral remaja di Desa Aman Damai Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD, Kepala Dusun dan tokoh masyarakat.

Hasil Penelitian menunjukkan: (i) Pemerintah Desa Aman Damai memberikan dukungan moral dan material kepada Remaja Masjid dan memberdayakannya dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan, serta penyuluhan Bahaya Narkoba dan sex bebas, pelatihan keterampilan, sosialisasi UU dan perlombaan. (ii) Faktor pendukung: Pemerintah Desa Aman Damai mendukung setiap kegiatan Remaja Masjid, kepedulian orang tua, dan komunikasi yang baik dengan *stakeholder* terkait, (iii) Faktor Penghambat: perkembangan teknologi informasi mengakibatkan sebagian remaja kecanduan terhadap *game*, *gadget*, media sosial, pengaruh budaya asing, serta peredaran Narkoba dan pergaulan bebas.

Kesimpulan penelitian ini: Pemerintah Desa Aman Damai Kec. Sirapit Kabupaten Langkat telah berperan dalam mendukung pembinaan moral remaja dan disarankan hendaknya pemerinah desa memberikan pembinaan kepada remaja berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta materi pembinaan yang membangun mental dan karakter generasi muda yang tangguh.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Remaja Masjid, Perilaku Remaja

ABSTRACT

RURAL GOVERNMENT ROLE IN GUIDING MOSLEM YOUTH ORGANIZATIONS FOR CREATING ISLAMIC YOUNG GENERATION CHARACTER (CASE STUDY IN THE VILLAGE OF AMAN DAMAI SIRAPIT DISTRICT, LANGKAT REGENCY)

The young generation is the backbone and hope of a nation and state because they are as the successor of national development in the future

The problem formulation: 1). how is the role of Rural/Village government in guiding the teenagers' character at the Village of Aman Damai District of Sirapit, Langkat Regency? 2). What are the constraints and supporting factors of Rural/Village government in the teenagers' character at the Village of Aman Damai District of Sirapit, Langkat Regency?

This research aims: describe the role of village government in the moral development of youths in Village Aman Damai, district of Sirapit Langkat Regency.

This is a descriptive study with qualitative approach. The informants: head of Village, Secretary, the Chairman and Members of BPD, community leaders.

Results: (i) The role of Rural government: providing moral and material support and empowerment (ii) supporting factors : rural government of Aman Damai concern in supporting any activity of Youths, participation of parents, and good communication with stakeholders, (iii) Obstacles: influence of information technology has resulted: addicted to games, gadgets, social media and reluctant to socialize with the environment, non religious foreign culture, drugs and free sex.

The conclusion of this research: Village of Aman Damai District of Sirapit, Langkat Regency has significant role in guiding the teenagers morale and character and suggested that it should give the guidance to teenagers by applying sciences and technology and also the material or content of the guidance that can build the teenagers' strong mental and nation character building to the young generation.

Key words: Rural Government, Moslem Youth, Teenagers Characters

KATA PENGANTAR



Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tahap akhir studi di Program Studi Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yakni dengan menyelesaikan penelitian akhir/skripsi tepat pada waktunya. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi utusan-Nya dan panutan seluruh umat manusia hingga di akhir zaman.

Selama pengerjaan Skripsi ini, penulis banyak menerima masukan, bantuan dan fasilitas dari berbagai pihak guna penyelesaian skripsi ini dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda serta ibunda tercinta atas segala doa restu dan kasih sayang kepada ananda yang tiada terkira.
2. Istri tercinta yang selalu mendoakan dan mendukung kakanda dalam setiap langkah kehidupan baik dalam suka dan duka
3. Anak-anakku tercinta, atas dukungan moral dan doa serta pengertian yang besar karena telah sedikit mengabaikan kalian selama menuntut ilmu di Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMA
4. Bapak Prof. Dr. Yakub Matondang, selaku Rektor UMA.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA, selaku Dekan FISIP UMA.

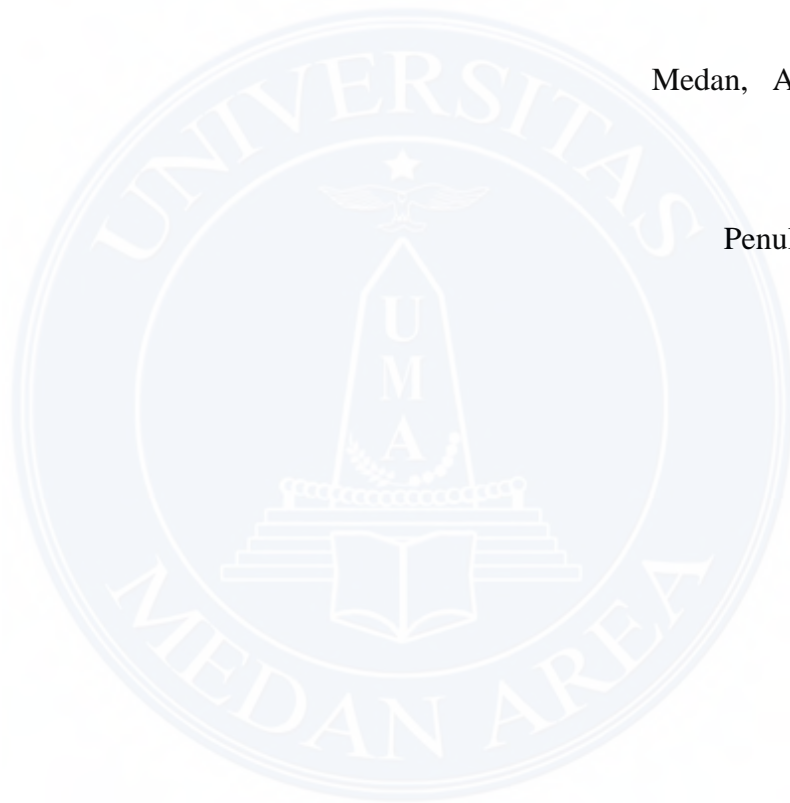
6. Bapak Drs M. Aswin Hasibuan, MAP., selaku Ketua/Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan arahan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku pembimbing II atas arahnya
8. Ibu Beby Masitho, S.Sos, MAP selaku sekretaris atas segala bantuannya
9. Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH atas izin Belajar dan izin penelitiannya.
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat, Bapak Musti, SE, M.Si beserta Jajarannya atas administrasi izin belajarnya
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat, Bapak Sujarno, S.Sos, M.Si beserta jajarannya atas administrasi izin penelitiannya.
12. Bapak Drs. Jaya Sitepu selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kab. Langkat beserta jajarannya.
13. Camat Sirapit, Bapak Endamia, SE beserta jajarannya
14. Bapak Suherman selaku Kepala Desa Aman Damai beserta jajarannya.
15. Seluruh dosen, pegawai dan petugas keamanan di Program Studi Pemerintahan FISIP UMA, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
16. Sahabat-sahabat seperjuanganku yang merupakan teman-teman di di Program Studi Pemerintahan FISIP UMA, semoga tetap kompak selalu.
17. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian Skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari terdapat kekurangan dalam Skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran atas perbaikan Skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini memberi manfaat bagi kita semua khususnya Pembinaan remaja sebagai generasi penerus bangsa.

Amin.

Medan, Agustus 2016

Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pembatasan Masalah	4
1.3. Perumusan Masalah	4
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Manfaat penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1. Uraian Teori	6
2.1.1. Pembangunan	6
2.1.2. Desa.....	8
2.1.3. Pembangunan Desa	11
2.1.4. Indikator Pembangunan Desa	12
2.1.4.1. Pembangunan Melalui Kelembagaan Desa.....	12
2.1.4.2. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	14
2.1.5. Organisasi Kepemudaan Remaja Masjid	15
2.2. Landasan Teori.....	21
2.2.1. Teori Peranan	21

2.2.2. Dasar Hukum Peraturan Perundang-undangan Kebijakan Pemerintah dalam pembinaan Generasi Muda	22
2.3. Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1. Bentuk Penelitian	26
3.2. Lokasi Penelitian.....	26
3.3. Informan	26
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.4.1. Wawancara.....	27
3.4.2. Penelitian Kepustakaan	28
3.5. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
4.1. Hasil Penelitian	29
4.1.1. Gambaran Umum Desa Aman Damai.....	29
4.1.2. Monografi Desa Aman Damai	30
a. Letak Geografis	30
b. Batas Wilayah	30
c. Luas Wilayah.....	30
d. Orbitasi Desa Aman Damai	31
e. Kependudukan.....	31
f. Keagamaan dan Suku/etnis.....	31
g. Pendidikan.....	32
h. Mata Pencaharian	32

	i. Sarana dan Prasarana Desa	32
4.2.	Pembahasan.....	33
	4.2.1. Peran Pemerintah Desa dalam Pembinaan Moral Remaja di Desa Aman Damai Kec. Sirapit Kab. Langkat.....	33
	4.2.2. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Pemerintah Desa dalam Pembinaan Moral Remaja di Desa Aman Damai Kec. Sirapit Kab. Langkat	41
	4.2.2.1. Faktor Pendukung	41
	4.2.2.2. Faktor Penghambat.....	42
	4.2.3. Strategi Dalam Pembinaan Karakter Generasi Muda/Remaja	46
	4.2.4. Krisis Jati Diri Generasi Muda.....	49
	4.2.5. Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Generasi Muda	53
	4.2.6. Pembinaan Generasi Muda dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Langkat	56
BAB V	PENUTUP	60
	5.1. Simpulan	60
	5.2. Saran.....	61
	DAFTAR PUSTAKA	63
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Generasi muda merupakan tulang punggung dan harapan bagi bangsa dan negara karena kelak menjadi pelanjut tongkat estafet pembangunan nasional di masa yang akan datang. Pada tahun 2005 sampai dengan 2050 mendatang merupakan era/periode generasi emas dimana komponen paling besar dari komposisi penduduk di Indonesia adalah penduduk yang berusia produktif yang dikenal sebagai generasi muda. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia dalam mempersiapkan generasi penerus yang tangguh bagi keberlangsungan pembangunan nasional di masa yang akan datang.

Desa merupakan organisasi pemerintahan terkecil yang langsung berhadapan dengan masyarakat sebagai ujung tombang pemerintahan dan pelayanan publik. Desa telah memiliki otonomi yang diberikan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal ini Desa diberikan wewenang yang luas untuk mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimilikinya melalui prinsip demokrasi, peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemerataan ekonomi dan kesejahteraan, keadilan sosial dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. Dalam hal ini tujuannya adalah agar desa lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta terbukanya kesempatan kerja.

Salah satu fase yang sangat berkesan dan berpengaruh dalam kehidupan

setiap orang adalah ketika memasuki usia remaja. karena masa remaja merupakan masa yang tidak mempunyai tempat yang jelas dalam rangkaian proses perkembangan seseorang. Berbagai kasus kenakalan remaja akhir-akhir ini semakin memperlihatkan fenomena yang cukup mengkhawatirkan. bahkan telah mengancam kehidupan dan masa depan para remaja itu sendiri. yang pada akhirnya juga memberikan dampak terhadap pembangunan bangsa. Karena *dekadensi* moral (khususnya para remaja) dapat mengakibatkan meningkatnya tindakan kriminalitas dalam berbagai bentuk seperti tawuran, pencurian, perampokan, penjarahan, *free sex*, penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Fenomena buruk remaja sebagai generasi muda tersebut telah marak terjadi dan merupakan peristiwa yang kerap terjadi dan menghiasi pemberitaan di berbagai media cetak dan elektronik. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat sekitar 50 orang meninggal setiap hari karena penyalahgunaan Narkoba yang pada umumnya yang menjadi korbannya adalah generasi muda. penyalahgunaan Narkoba terjadi pada umumnya menjangkiti para remaja, bukan hanya di kota melainkan juga telah marak terjadi di desa-desa.

Kenakalan remaja atau *dekadensi* moral yang terjadi dalam kalangan remaja merupakan suatu permasalahan yang sangatlah penting dan menarik untuk dibahas. Mussen mendefinisikan kenakalan remaja. sebagai perilaku yang melanggar hukum atau suatu tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja yang biasanya berusia 16-18 tahun. dimana tindakan tersebut dapat membuat seseorang individu yang melakukannya masuk penjara. namun hal itu bukanlah jawaban atau solusi atas pembinaan remaja yang bersifat jangka panjang. upaya preventif atau pencegahan dipandang lebih efektif dan dipercaya

mampu membangun moral dan karakter remaja sebagai generasi muda penerus bangsa.

Remaja merupakan bagian dari generasi muda yang termasuk aset negara. dan juga merupakan tumpuan harapan bagi masa depan bangsa/negara dan agama. Untuk mewujudkannya, maka sudah menjadi kewajiban dan tugas kita semua khususnya pemerintah desa untuk mempersiapkan generasi muda menjadi generasi yang tangguh dan bermoral, berkarakter dan berkualitas dengan jalan membina, membimbing dan mengarahkan mereka sehingga menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab secara moral.

Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dinyatakan: “Pemerintah Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam membantu melaksanakan fungsi pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa” . hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa dapat bermitra dengan wadah partisipasi warga yang membina generasi muda sehingga dapat membentuk generasi muda yang berkarakter dan memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan tuntunan nilai-nilai luhur agama dan tatanan sosial kemasyarakatan.

Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan dan 240 Desa, dimana Desa Aman Damai merupakan salah satu dari 10 desa yang ada di kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat. Desa ini merupakan salah satu desa yang meraih banyak prestasi. Hal yang paling utama dalam melanjutkan keberhasilan ini adalah dengan membina generasi muda yang menjadi generasi penerus bangsa di masa yang akan datang yang diharapkan melanjutkan tongkat estafet pembangunan khususnya pembangunan desa. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka

dipandang perlu untuk melakukan kajian tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Membina Organisasi Kepemudaan Remaja Masjid Untuk Membentuk Perilaku Generasi Muda Islam (Studi Kasus Di Desa Aman Damai Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat)

1.2. Pembatasan Masalah

Organisasi yang membina remaja dan generasi muda pada Desa Aman Damai ini adalah Remaja Masjid dan Karang Taruna. Dalam penelitian ini peneliti mengkhususkan penelitian pada peran pemerintah Desa dalam membina Organisasi Kepemudaan Remaja Masjid di bawah naungan Badan Kerjasama Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Desa Aman Damai Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, maka permasalahan pokok yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Pemerintah Desa dalam pembinaan moral remaja di Desa Aman Damai Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan yang mendukung Pemerintah Desa dalam pembinaan moral remaja di Desa Aman Damai Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Mendeskripsikan peran Pemerintah Desa dalam pembinaan moral remaja di Desa Aman Damai Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung Pemerintah Desa dalam pembinaan moral remaja di Desa Aman Damai Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.

1.5. Manfaat Penelitian

Sasaran dan manfaat dari pelaksanaan penelitian adalah :

- 1) Manfaat Praktis, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Langkat dan Pemerintah Desa Aman Damai Kecamatan Sirapit, dalam membina Organisasi Kepemudaan Remaja Islam sebagai generasi penerus. Penelitian ini juga diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat tentang upaya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa khususnya generasi muda / pemuda.
- 2) Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan wawasan berpikir ilmiah dan diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian Ilmu Pemerintahan khususnya mengenai pembinaan dan pemberdayaan komponen masyarakat yakni generasi muda / pemuda.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pembangunan

Gerakan pembangunan ialah usaha yang berwatak kemanusiaan dan lahir dari suatu kesaksian dan komitmen akan harkat dan martabat manusia. Secara normatif pembangunan itu mesti mewujudkan manusiawi dan tampil sebagai manifestasi serta aktualisasi dari nilai-nilai insaniah yang penuh harkat dan martabat. (Richard M Steers, 1980:67) Oleh karena itu dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk meningkatkan derajat kemanusiaan yang berangkat dari nilai hidup dan kebutuhan yang hendak dicapai oleh manusia.

Dalam mendorong dan melaksanakan pembangunan diperlukannya peran aktif negara/pemerintah dengan diikuti oleh *stakeholder* lainnya dan masyarakat. Peran pemerintah lebih diutamakan melalui perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijaksanaan pembangunan. Dalam pembangunan pemerintah juga mengupayakan untuk mengarahkan masyarakat ikut serta dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Administrasi negara juga memberikan peran dalam mendukung proses pembangunan yakni mendukung proses perubahan, memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. (Ketaren, 2011:5)

Kehadiran administrasi pembangunan sebenarnya merupakan salah satu paradigma administrasi negara yaitu paradigma yg berkembang setelah ilmu administrasi negara sebagai ilmu administrasi pada sekitar tahun 1970. Mengacu

dari kerangka perkembangan administrasi pembangunan seperti tersebut di atas Kristiadi (1994:21) memberi pengertian tentang Administrasi Pembangunan adalah Administrasi Negara yang mampu mendorong kearah proses perubahan dan pembaharuan serta penyesuaian. Oleh karena itu administrasi pembangunan juga merupakan pendukung perencanaan dan implementasinya.

Masalah yg serius dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah lemah kemampuan birokrasi dalam menyelenggarakan pembangunan. Dari latar belakang ini maka administrasi pembangunan yg berkembang di negara-negara sedang berkembang memiliki perbedaan ruang lingkup dan karakteristik dengan negara-negara yang telah maju. Dasar inilah Bintoro Tjokroamidjojo (1995) mengemukakan bahwa administrasi pembangunan mempunyai tiga fungsi:

1. penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara yang meliputi upaya penyempurnaan organisasi pembinaan lembaga yang diperlukan kepegawaian dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya. Ini disebut *the development of administration (pembangunan administrasi)* yang kemudian lebih dikenal dengan istilah "*Administrative Reform*" (*reformasi admnistrasi*).
2. perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-programa pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaan secara efektif. Ini disebut *the administration of development (Administrasi untuk pembangunan)*. Administrasi untuk pembangunan (*the development of administration*)

3. pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tak mungkin terlaksana dari hasil kegiatan pemerintahan saja. Faktor yg lebih penting adalah membangun partisipasi masyarakat.

Administrasi pembangunan berperan aktif dan berkempentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan dan berorientasi pada upaya yang mendorong perubahan-perubahan kearah ke keadaan yang lebih baik dan berorientasi pada masa depan. Dalam hal ini pembangunan sumber daya manusia khususnya remaja dan pemuda menjadi hal yang sangat penting karena menjadi pilar utama dalam pembangunan

2.1.2. Desa

Desa dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa atau nama lain adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan definisi ini Desa dapat mengatur, mengurus kepentingan masyarakat desa khususnya generasi muda dalam hal ini remaja mesjid yang ada di Desa Aman Damai Kec. Sirapit dalam rangka membangun karakter generasi muda sebagai penerus cita-cita pembangunan.

Beberapa ahli juga mengutarakan defenisi desa antara lain, menurut Yayuk dan Mangku (2003) desa berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Ahli lain seperti Zakaria (2003:91) mengutarakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah

yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

Dalam defenisi ini menegaskan bahwa desa sebagai satu unit kelembagaan pemerintahan mempunyai kewenangan pengelolaan wilayah pedesaan. Wilayah pedesaan sendiri diartikan sebagai wilayah yang penduduknyamempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi wilayah sebagai pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

CorolieNdraha (1990:15), mengartikan pembangunan sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Sebaliknya dia mengatakan implikasi dari depenisi tersebut yaitu :

- a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia baik individu maupun kelompok (*Capacity*).
- b. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*)
- c. Menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (*Empowerment*).
- d. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*)

- e. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan yang lainnya dan menciptakan hubungan yang saling menghormati (*Interdependence*).

Sedangkan menurut Bryan dan White(1989 : 21-22) Pembangunan sebagai upaya suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi antara lain :

- a. Ia memberikan perhatian terhadap “ kapasitas “ terhadap apa yang ingin dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan
- b. Ia mencakup keadilan (*Equity*)
- c. Penumbuhan kuasa dan wewenang dalam pengertian bahwa jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima mamfaat pembangunan.
- d. Pembangunan berarti perhatian sungguh-sungguh terhadap saling ketergantungan di dunia serta perlu menjamin bahwa masa depan dapat di tunjang kelangsungannya.

Pendekatan pembangunan desa melalui cara pandang Demokrasi desa sangat diperlukan sekali dalam era otonomi daerah pada saat ini dikarenakan proses pembangunan desa tidak bisa terlepas dari segi demokrasi yang mempunyai nilai-nilai kebersamaan dalam suatu masyarakat, Agenda demokratisasi pada tingkat desa tidak dapat dipisahkan dengan beberapa variabel pengaruh, antara lain : Derajat dan kualitas demokrasi, kapasitas kelembagaan pemerintah desa,sumber daya masyarakat dalam proses pembangunan, desa merupakan entitas pemerintah yang langsung berhubungan dengan rakyat. Hal itu

desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan proses pembangunan yang lebih mengutamakan ruang lingkup demokrasi bagi desa.

2.1.3. Pembangunan Desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan di suatu desa, keterpaduan langkah dan tujuan akan menentukan hasil yang akan dicapai. Pada dasarnya hakekat pembangunan desa adalah pencapaian serta terciptanya kehidupan yang sejahtera, aman, tertib, dan sehat bagi seluruh warga desa atau terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. (I Nyoman Beratha, 1991:123)

Pembangunan masyarakat desa merupakan sesuatu proses dimana anggota masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut. Oleh karena itu pembangunan desa adalah kegiatan atau proses yang bertujuan untuk lebih mensejahterakan atau meningkatkan derajat kehidupan dari yang kurang baik kepada yang lebih baik disamping juga pembangunan desa lebih mengutamakan keinginan warga desa dan ditujukan untuk kebaikan bersama. (A. Suryadi, 1984:1). Oleh karena itu, Pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) merupakan hal yang penting mengingat sumber daya manusia khususnya generasi muda merupakan pilar utama pembangunan khususnya pembangunan desa.

Yan Indra mengemukakan (1997:43) tiga faktor yang dominan dalam pembangunan desa:

1. Kebijakan Pemerintah (*Top Down*), dalam arti sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator dalam mengerakkan masyarakat desa untuk

memberi respon yang positif melalui sikap mental (*attitudes*), rasa memiliki (*sence of belonging*) dan mempunyai rasa tanggung jawab.

2. Tanggapan masyarakat (*bottom up*), terutama ditekankan peran serta (partisipasi aktif) masyarakat desa dalam pembuatan keputusan, pelaksanaan, penikmatan manfaat atau hasil dan keikutsertaan dalam mengevaluasi hasil-hasil pembangunan.
3. Suatu lembaga atau instansi baru yang bersifat otonom, berperan menghimpun dana dan biaya, guna mengoptimalkan kegiatan lembaga-lembaga pemerintah.

2.1.4. Indikator Pembangunan Desa

Pembangunan desa hanya mungkin berhasil dengan adanya rencana yang baik, masuk akal dan dapat direalisasikan dalam jangka waktu yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan, tersedianya sumber tenaga manusia, modal dan sumber daya lainnya serta adanya organisasi yang mampu untuk mewujudkan rencana menjadi hasil. (BN. Marbun, 1988:34)

R. Agusthoha Kuswata (1985:34) Mendefenisikan pembangunan desa adalah usaha yang dilakukan dimana konsentrasinya lebih berfokus kepada peningkatan pembangunan ekonomi desa dan peningkatan pembangunan sosial desa.

2.1.4.1. Pembangunan Desa Melalui Kelembagaan Desa

Istilah lembaga dan organisasi secara umum penggunaannya dapat dipertukarkan dan hal tersebut menyebabkan keambiguan dan kebingungan diantara keduanya. Perbedaan antara lembaga dan organisasi masih sangat kabur. Organisasi yang telah mendapatkan kedudukan khusus dan legitimasi dari

masyarakat karena keberhasilannya memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dalam waktu yang panjang dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah melembaga. Menurut Syahyuti (2006:37) setidaknya ada empat cara membedakan kelembagaan dengan organisasi, yaitu:

1. Kelembagaan adalah tradisional, organisasi modern.
2. Kelembagaan dari masyarakat itu sendiri, organisasi datang dari atas
3. Kelembagaan dan organisasi berada dalam satu kontinum. Organisasi adalah kelembagaan yang belum melembaga yang sempurna adalah organisasi yang melembaga.
4. Organisasi merupakan bagian dari kelembagaan. Organisasi sebagai organ kelembagaan.

Pemerintahan desa merupakan lembaga yang ada di dalam desa, dengan control dari Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan termasuk melaksanakan proses pembangunan di daerahnya. Agar pembangunan dapat tepat sasaran maka pemerintah desa bertugas untuk mengidentifikasi pembangunan yang sesuai dengan di daerahnya sehingga peran pemerintah desa sebagai sarana penyampaian kebijakan pemerintah kecamatan maupun kebijakan pemerintah kabupaten dapat sampai di desa. Pemerintah Desa juga berperan dalam memberdayakan potensi remaja, khususnya remaja masjid yang membangun karakter remaja yang religius.

2.1.4.2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Proses pembangunan yang berkelanjutan memerlukan kerja sama dalam semua pihak termasuk partisipasi masyarakat. Menurut Abdul A.S proyek pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya ternyata lebih baik dari tatacara konvensional yang bersifat top down. Beberapa alasan partisipasi penting dalam proses pembangunan:

1. Partisipasi dalam praktek yang sederhana telah lama dibangun dalam pemahaman, kesadaran dan kehidupan masyarakat
2. Partisipasi memungkinkan perubahan yang lebih besar dalam cara berfikir, bersikap dan bertindak manusia. Hal ini sulit dilakukan jika perubahan ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil atau kelompok tertentu yang tidak terlibat langsung
3. Pemecahan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh hanya dapat dilakukan melalui proses interaksi, kerjasama dan berbagai peran.
4. Penggunaan sumber daya dan pelayanan bagi masyarakat tidak dapat tercapai oleh gagasan yang dibangun oleh pemerintah atau pengambil kebijakan saja, karena sumber daya pendukung lebih banyak dimiliki oleh individu, kelompok atau organisasi masyarakat. Oleh karena itu, kontribusi dan kerangka mekanisme pelayanan harus melibatkan masyarakat sebagai pemilik dan pengguna pelayanan itu.

5. Partisipasi merupakan suatu proses pelibatan orang lain terutama kelompok masyarakat yang terkena langsung untuk merumuskan masalah dan mencari solusi secara bersamaan.
6. Masyarakat memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan program yang lebih baik termasuk tujuan, pengetahuan, situasi, struktur sosial dan pengalaman menggunakan teknologi untuk kepentingannya
7. Masyarakat akan lebih termotivasi untuk bekerja sama dalam program pembangunan, jika ikut terlibat dan bertanggung jawab di dalamnya
8. Dalam kehidupan demokratis, secara umum masyarakat menerima bahwa mereka berhak berpartisipasi dalam keputusan mengenai tujuan dan harapan yang ingin dicapai
9. Banyak permasalahan pembangunan dibidang pertanian, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan kelembagaan yang tidak mungkin dipecahkan dengan pengambilan keputusan perorangan. Partisipasi kelompok sasaran dalam keputusan kolektif sangat dibutuhkan.

2.1.5. Organisasi Kepemudaan Remaja Masjid

Remaja adalah generasi penerus bangsa, negara, dan agama. Mereka perlu dididik, dibimbing, dan diarahkan agar mereka menjadi penerus yang berdedikasi tinggi. Salah satu cara mengarahkan remaja adalah dengan melibatkan mereka dalam organisasi di lingkungan sekitarnya salah satunya adalah organisasi kepemudaan remaja masjid. Remaja diajak untuk berpartisipasi dalam acara-acara

yang diadakan oleh suatu organisasi ataupun mereka di libatkan langsung dalam kepengurusan organisasi tersebut. Dengan keterlibatan mereka didalam kegiatan maupun dalam kepengurusan organisasi mereka diarahkan untuk menggunakan waktu ke hal-hal yang positif dan menghindarkan mereka dari pengaruh negatif dari lingkungan yang kurang baik.

Remaja Masjid adalah bagian dalam organisasi yang terdapat di lingkungan masyarakat yang bergerak di bidang keagamaan. remaja Mesjid bertugas mengelola masjid dan mengarahkan masyarakat untuk lebih meningkatkan iman dan taqwa umat Islam. remaja Mesjid dibentuk berdasarkan kepercayaan masyarakat kepada orang-orang tertentu. Ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam memilih pengelola masjid, diantaranya:

- 1) Orang berwibawa, memiliki pengetahuan yang luas, jujur dan pemberani.
- 2) Sebagai suri teladan, dapat melaksanakan fungsi tugasnya dengan amanah dan keikhlasan.
- 3) Berdedikasi dalam perencanaan dan pengembangan sarana masjid.
- 4) Mengikutsertakan remaja di dalam susunan kepengurusan untuk mengembangkan generasi penerus.

Remaja Masjid sebagai pewarna Kemakmuran Mesjid memiliki tugas mengelola, memakmurkan dan mengembalikan fungsi dan peran masjid yang seutuhnya. Yang dimaksud peran dan fungsi masjid yang seutuhnya adalah masjid yang tidak hanya digunakan sebagai tempat melaksanakan shalat saja, tetapi mesjid yang digunakan sebagai tempat melakukan aktivitas yang membawa pada

keimanan dan ketaqwaan. Untuk menjalankan tugasnya Remaja Masjid harus menggunakan manajemen yang baik. Sebelum membahas manajemen masjid alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu definisi dan peran masjid.

Dalam pengertian sehari-hari, masjid merupakan bangunan tempat shalat bagi kaum muslim. Pada hakikatnya masjid merupakan bangunan tempat melakukan segala aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah SWT. Masjid didirikan atas dasar keimanan dan ketaqwaan. Jika seseorang ingin membangun sebuah masjid maka hal tersebut harus dilakukan atas dasar keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT, jangan atas dasar ingin dilihat orang lain dan sebagainya yang membuat seseorang menjadi sombong.

Pada awalnya, peran mesjid tidak hanya sebatas memfasilitasi pelaksanaan shalat saja. Namun mesjid juga berfungsi sebagai pusat pengendalian kepemimpinan, administrasi, dakwah dan tempat untuk musyawarah. Mesjid juga sebagai tempat untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan hukum, mengeluarkan fatwa, proses pembelajaran, dan informasi penting. Serta urusan lain yang berkaitan dengan urusan agama dan pemerintahan. Oleh karena itu, masjid di pandang sangat berharga bagi masyarakat mukmin. Tetapi pada saat ini peran masjid hanya sebatas tempat untuk beribadah atau shalat saja. Masjid sekarang hanya sebatas bangunan megah tanpa makna.

Masjid sejatinya tidak hanya digunakan untuk merefleksikan simbol fisik keagamaan seperti shalat dan lainnya, namun juga mampu membuat masyarakat peduli pada lingkungan sekitar. Mencetak sumber daya manusia yang beriman dan profesional. Mampu menyehatkan masyarakat dan berperan sebagai mitra dalam

membangun negara. Semua itu bisa tercapai jika kita memahami hakikat risalah masjid yang di dalamnya ditanamkan nama islam.

Untuk menciptakan masjid yang utuh dibutuhkan manajemen yang baik. Pengelola yang baik adalah wujud dari manajemen yang baik. Pengelola masjid ataupun Remaja Masjid harus mempunyai target atau rencana tertentu. Untuk mendukung rencana tersebut harus ada perencanaan yang baik yaitu dengan mendistribusikan tugas kepada orang yang mampu. Seluruh pengelola harus difungsikan untuk mencapai target tertentu. Lalu kemudian beraksi untuk merealisasikan apa yang menjadi cita – cita bersama.

Prinsip organisasi perlu diterapkan dalam mengelola masjid. Manajemen masjid dan prinsip organisasi digunakan secara bersama – sama untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen masjid identik dengan kegiatan psikis. Dalam prakteknya, manajemen (*Al – Idarah*) terbagi menjadi 2 bagian yakni *physical managemen (idaratu binail maddiyyi)* dan *functional management (idaratu binair ruhiyyi)*.

Physical managemen (idaratu binail maddiyyi) adalah manajemen secara fisik yang meliputi kepengurusan masjid, pengaturan pembangunan masjid, penjagaan kehormatan masjid, kebersihan, ketertiban dan keindahan masjid, pemeliharaan ketentraman masjid dan administrasi masjid. *Functiona management (idaratu binair ruhiyyi)* adalah meliputi pengaturan tentang pelaksanaan fungsi masjid sebagai wadah pembinaan umat, sebagai pusat pembangunan umat lewat pendidikan dan pengajaran (majelis taklim).

Menjaga eksistensi masjid sesuai dengan fungsi dan peranannya menjadi kewajiban seluruh umat muslim. Kewajiban ini tidak hanya di pikul oleh

pengelola masjid/remaja masjid, namun dipikul oleh seluruh jamaah meskipun tugas ini menjadi tugas pengelola. Masjid menjadi benteng pertahanan umat muslim. Masjid harus dijaga suasananya agar tetap khidmat sebagai tempat suci peribadatan umat islam.

Functional management (idaratu binail ruhiyyi) mempunyai efek sangat besar bagi kesehatan sebuah masjid. Pembinaan ini dapat dilaksanakan secara dua arah, yakni pembinaan terhadap pengelola dan pembinaan terhadap jamaah masjid. Melakukan pembinaan berarti membentuk kepribadian (*takwinus syakhshiyah*) yang memiliki karakter unik yaitu amanah, jujur, peduli, luas wawasan, mandiri, benar dalam beribadah, bersih dalam akidah, kuat fisik, bermanfaat bagi orang lain, teratur dalam hidupnya, selalu cermat dalam waktunya, berjiwa patriotik, dan kuat akhlaknya.

Pembentukan kepribadian dan pembangunan karakter adalah upaya untuk membentuk kader yang mampu mengemban tugas dan amanah dakwa dalam rangka menegakan agama (*iqamatu din*). Kita perlu membangun model pengelola dan pengembangan masjid antara *orisinalitas* zaman dahulu dan *modernitas* yang akan melahirkan sebuah kekuatan baru itu akan mengembalikan eksistensi masjid ke arah yang lebih baik. Pengembangan dapat berupa :

1. Menyediakan ruang baca atau perpustakaan.
2. Menampilkan buletin dan papan informasi.
3. Menyediakan ruang serba guna.
4. Adanya rator pengurus harian.
5. Membangun lembaga pendidikan dan pelatihan.

6. Mengadakan koperasi atau lembaga pemberdayaan umat.

7. Membentuk lembaga BAZIS (Badan Amil zakat, infak, dan sedekah).

Selain pengembangan masjid, akan lebih baik jika masjid mampu menyelesaikan problematika yang dihadapi masyarakat. Hal ini penting untuk kita pahami sesuai dengan risalah islam yang *universal*. Islam tidak hanya mambatasi diri untuk mengatur peribadatan kita dengan Allah SWT, namun juga dengan seluruh dimensi kehidupan manusia. Kita bisa mengambil beberapa poin penting tentang peran dan fungsi masjid bagi masyarakat secara umum dalam membantu menyelesaikan permasalahan umat, yaitu :

1. Masjid sebagai wahana konsultasi keagamaan.
2. Masjid sebagai wahana konsultasi masalah keluarga.
3. Masjid sebagai wahanakonsultasi masalah sosial.
4. Masjid sebagai wahana pengembangan pendidikan masyarakat.
5. Masjid sebagai wahana pengembangan keterampilan.
6. Masjid sebagai wahana pemberantasan kemiskinan.
7. Masjid sebagai wahana meringankan beban orang tidak mampu.
8. Masjid sebagai wahana pembinaan generasi muda.
9. Masjid sebagai wahana mitra pengembangan perekonomian masyarakat.
10. Masjid sebagai wahana menyetatkan masyarakat.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Peran

Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Arisandi, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.

Menurut Horton dan Hunt [1993], peran (role) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton [1968] dinamakan perangkat peran (role set). Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat (nature) dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (reward) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat

memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan. Sedangkan, Abu Ahmadi [1982] mendefinisikan peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

2.2.2. Dasar Hukum Peraturan Perundang-undangan Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Generasi Muda

Sebagaimana yang ditegaskan dalam UU No. 40/2009 Pasal 9 dan 13 Tentang Kepemudaan, ditegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bersinergi dalam pelayanan kepemudaan dalam upaya pemberdayaan. Sedangkan pada Pasal 7 dan Pasal 8, pelayanan kepemudaan di arahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pada Pasal 8, disebutkan bahwa strategi pelayanan kepemudaan adalah bela negara; kompetisi dan apresiasi pemuda; peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda; pendampingan pemuda; perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan

pendidikan serta keterampilan; dan penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Selain itu esensi pemberdayaan generasi muda sebagaimana Pasal 24 dan 25 UU No. 40/2009 dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. Melalui peningkatan iman dan takwa; peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi; penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional; peneguhan kemandirian ekonomi pemuda; peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

Akan tetapi, sebelum memahami lebih lanjut kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan generasi muda, perlu dipahami bahwa setiap kebijakan dan program tersebut dapat dibagi menjadi dua: yakni program kebijakan pemberdayaan generasi muda yang terkait langsung. Program pemberdayaan generasi muda yang langsung terkait dengan permasalahan generasi muda. Biasanya langsung berada di bawah kementerian atau dinas terkait. Sedangkan program kebijakan pemberdayaan generasi muda yang tidak terkait langsung adalah program turunan yang tidak langsung memosisikan generasi muda sebagai permasalahan itu sendiri. Hal ini biasanya dilakukan dalam bentuk lintas kementerian atau dinas tertentu.

Mengacu pada penjelasan tersebut di atas, maka pola kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan generasi muda terbagi dalam lima pola kebijakan, yakni: Pertama, kebijakan pemberdayaan generasi yang dilakukan oleh satu kementerian

atau dinas tertentu tanpa melibatkan unsur lainnya. Pola ini biasanya terfokus hanya pada kementerian terkait, misalnya program pemberdayaan kepemudaan yang dilakukan oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga atau program belajar luar sekolah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kedua, program kebijakan pemberdayaan yang melibatkan dua kementerian atau dinas tertentu. Pada pola kebijakan ini kementerian-kementerian terkait dan atau dinas-dinas terkait melakukan kerja sama untuk menjalankan program pemberdayaannya dalam bentuk aktivitas-aktivitas program. Salah satu contohnya adalah program deradikalisasi pemuda, di mana melibatkan Kemendikbud, Kemenag, dan unsur Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), baik langsung maupun tidak langsung.

Ketiga, pola pemberdayaan kerja sama antar kementerian atau satu kementerian yang melibatkan unsur non pemerintah. Pada pola ketiga ini misalnya program penyuluhan bahaya penyalahgunaan Narkoba di mana pihak terkait, baik Kemenegpora, Kemendikbud, Polri, BNN mengajak unsur non pemerintah melakukan kampanye terkait dengan hal tersebut.

Keempat, Kementerian atau Dinas tertentu yang mendukung Ornop atau kelompok masyarakat. Bila pada pola ketiga bentuknya kerja sama, maka pada pola ini kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan generasi muda, pemerintah, baik pemerintah pusat maupun Pemda membantu sejumlah organisasi masyarakat yang memiliki program terkait dengan pemberdayaan generasi muda melalui pos anggaran dari APBN maupun APBD. Dan kelima, program pemberdayaan generasi muda yang bersifat mandiri, terkait dengan kekhasan didaerah tertentu, di

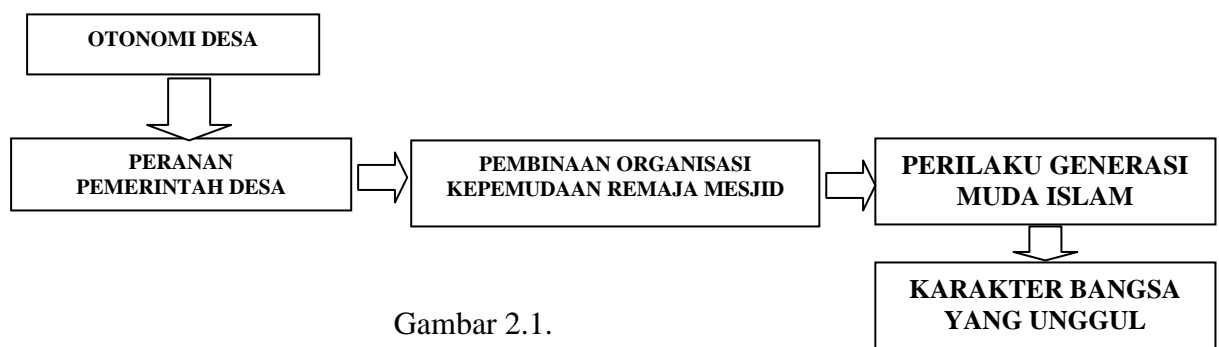
mana tiap daerah memiliki problematika kepemudaan dan generasi muda yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Melihat pada lima pola kebijakan pemberdayaan generasi muda oleh pemerintah, maka kita bisa melihat bagaimana efektif tidaknya pola kebijakan pemberdayaan tersebut bagi generasi muda secara umum. Setidaknya bila menyangdingkan lima permasalahan generasi muda, sebagaimana diuraikan di awal maka dapat ditarik benang merahnya, yakni: Pertama, bahwa kebijakan pemberdayaan generasi muda memiliki tiga sifat, yakni: bersifat mandiri satu kementerian atau dinas; lintas kementerian atau dinas; dan kerjasama dengan pihak terkait.

Kedua, Kebijakan pemberdayaan generasi muda oleh pemerintah dapat dijalankan secara mandiri oleh Pemda terkait berdasarkan kekhasan yang ada di daerahnya, ataupun oleh masyarakat secara swakelola, dengan tetap mengacu pada esensi kebijakan pemberdayaan generasi muda oleh pemerintah.

Ketiga, kebijakan pemberdayaan generasi muda juga menitiktekan bahwa organisasi kepemudaan tidak hanya sebatas obyek dari kebijakan pemberdayaan tersebut melainkan juga ikut secara aktif dalam berbagai program pemberdayaan, baik terkait ataupun tidak terkait.

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni menggambarkan peranan Pemerintah Desa dalam membina organisasi kepemudaan remaja mesjid untuk membentuk perilaku generasi muda Islam di Desa Aman Damai Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat berdasarkan indikator yang telah ditentukan, juga menelusuri lebih mendalam masalah-masalah pembinaan organisasi kepemudaan remaja mesjid dan dan hal-hal lain sesuai dengan temuan-temuan yang berkembang di lapangan, terkait dengan program pemberdayaan generasi muda oleh pemerintah desa di Desa Aman Damai Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Aman Damai Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat. Adapun alasan pemilihan desa tersebut adalah karena Desa Aman Damai adalah salah satu desa yang memiliki banyak prestasi serta pemberdayaan dan pembinaan remaja /pemuda nya berlangsung dinamis.

3.3. Informan.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun dan tokoh masyarakat, adat dan agama yang ditetapkan secara

purposive berdasarkan relevansinya dengan jenis data yang dibutuhkan sesuai dengan indikator pertanyaan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan untuk memperoleh informasi tentang peranan Pemerintah Desa dalam membina organisasi kepemudaan remaja mesjid untuk membentuk perilaku generasi muda Islam di Desa Aman Damai Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat terdiri dari data primer data dan sekunder. Data Primer berasal dari wawancara dengan informan penelitian, baik informan kunci, informan utama dan informan biasa. Alat pengumpul data yang dipergunakan untuk menjaring data primer adalah dengan metoda triangulasi yang terdiri dari teknik wawancara yang mempergunakan panduan/pedoman wawancara serta penilaian masyarakat melalui kuesioner. Data sekunder yang terdiri dari dokumen tertulis diperoleh dari berupa bahan-bahan pustaka, peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis pemerintahan desa.

3.4.1. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui dua tahap yakni wawancara awal dan wawancara mendalam. Wawancara awal dimaksudkan untuk menggali berbagai informasi awal berkaitan dengan data sekunder yang dibutuhkan dan untuk menyusun data informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini. Tahap selanjutnya adalah melakukan wawancara mendalam terhadap informan dari daftar yang telah diverifikasi, dengan menggunakan pedoman instrumen yang sudah dipersiapkan oleh Peneliti. Wawancara mendalam dengan informan kunci digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai indikator-indikator yang dipelajari. Responden (informan) untuk wawancara mendalam tersebut dilakukan

dengan Pejabat Daerah antara lain Kepala desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD, Tokoh masyarakat, adat dan agama, serta beberapa elemen pemuda/remaja mesjid dan masyarakat.

3.4.2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini juga dikumpulkan data sekunder yang dilakukan melalui studi pustaka. Data sekunder tersebut terdiri dari dokumen-dokumen penting baik dalam bentuk buku-buku, jurnal, surat kabar, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang berkaitan dengan topik/judul penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa langkah antara lain : *editing data*, *coding data* dan selanjutnya mengelompokkan data-data tersebut menurut jenisnya dengan cara menandai jawaban-jawaban responden dan selanjutnya memasukkan ke dalam tabel agar dapat ditafsirkan. Sedangkan data yang diperoleh dari wawancara setelah diberi kategori-kategori selanjutnya ditafsirkan dan dideskripsikan

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta :Rineka Cipta
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat. *Kabupaten Langkat Dalam Angka 2010*, 2010
- Beratha. I Nyoman. 1991. *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkunga*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Daradjat, Zakiah. *Remaja Harapan dan Tantangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Penyusunan Laporan Penyuluh Agama; Panduan Tugas Penyuluh Agama Islam*. Jakarta: Depag RI. 2000.
- _____ *Pedoman Penyuluha Wakaf Bagi Penyuluh Agama*. Jakarta: Depag RI, 2010.
- Haw.Widjaja, 2003. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Humas/informasi Pemda Kabupaten Langkat, *Selayang Pandang Bumi Langkat Berseri*, 2010
- Faisal Sanafiah. 1981. *Menggalang Gerakan Bangun Diri Masyarakat Desa*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Indra. Yan. 1997. *Efektivitas pelaksanaan Program Pembangunan Desa*, Medan : Skripsi.
- Kholil, Syukur. *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Citapustaka, 2006.
- Kuswata. R. Agusthoha. 1985. *Manajemen Pembangunan Desa*. Yogyakarta : Grafindo Utama.
- Marbun BN. 1988. *Proses Pembangunan Desa Menyongsong Tahun 2000*. Jakarta : Erlangga
- Monks, F.J. *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.

Nasution, Zulkarimen. *Komunikasi Pembangunan; Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Edisi Revisi. Cet. IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Nurlela Kataren. 2011. *Administrasi Pembangunan*, Medan : Sinuraya

Oghie, Harianto. *Sketsa Gerakan Refleksi dan Otokritik BKPRMI*, Cet I. Jakarta : Pustaka Wacana, 2003

Richard. M. Steers. 1980. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga.

Rukminto. 2003. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta : Rineka Cipta.

Siagian, Sondang P. 1992. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Singarimbun, Masri, Sofian Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES.

Soedjarwo, Istiwidayanti. *Psikologi Perkembangan*. Terj. *Developmental Psychology*. Jakarta: Erlangga, 1980.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: PT. Alfabeta.

Suryadi. A. 1984. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung : CV Mandar Maju.

Tim Balai Pustaka Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Cet. III. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Tjokrowinoto. 1996. *Pembangunan dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar

Umar, Mussen. *Kenakalan Remaja Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Positif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.

Wrihatnolo, Riant. 2007. *Pemberdayaan Dalam Pembangunan*. Jakarta : Sinar Baru.

Yayuk Y, Mangku P. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama.

Zakaria. 2003. *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta : Liberty.

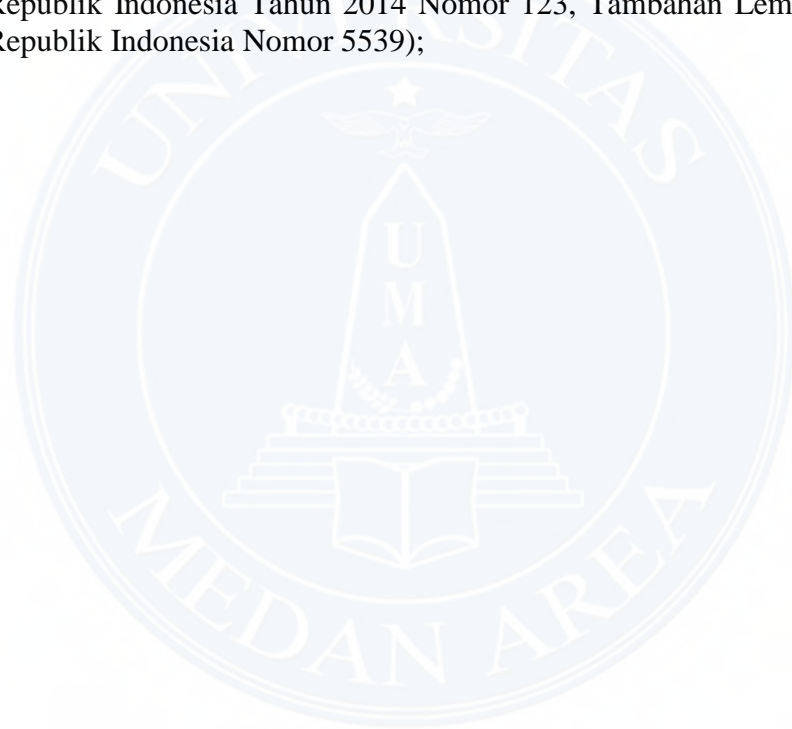
Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

I. Peran Pemerintah Desa dalam pembinaan moral remaja di Desa Aman Damai Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.

- 1) Bagaimana Peran pemerintah Desa Aman damai dalam membina Moral Remaja ?
- 2) Apa wujud kegiatan-kegiatan remaja di Desa Aman Damai?
- 3) Siapa saja yang terlibat dalam pembinaan moral remaja?
- 4) Apa wujud bantuan pemerintah Desa dalam pembinaan moral remaja?
- 5) adakah program khusus bagi pembinaan moral remaja di Desa Aman Damai khususnya dalam RPJMDes, RKPDes dan dituangkan dalam APBDes?
- 6) Bagaimana Prestasi Generasi Muda di Desa Aman Damai?

II. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Pemerintah Desa dalam pembinaan moral remaja di Desa Aman Damai Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.

- 1) Apa saja yang menjadi masalah dalam pembinaan moral remaja di Desa Aman Damai?
- 2) Apakah SDM aparatur pemerintah desa mampu mengatasi masalah tersebut?
- 3) Apakah dukungan dari pemerintah desa telah mencukupi?
- 4) Apa yang menjadi Faktor Pendukung dalam pembinaan Moral Remaja?

- 5) Apa yang menjadi Faktor Penghambat bagi pembinaan Moral Remaja?



TRANSKRIP WAWANCARA

Dengan Kepala Desa Aman Damai

(6 Mei 2016 pukul 11:00 WIB)

I. Peran Pemerintah Desa dalam pembinaan moral remaja di Desa Aman Damai Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.

1) Bagaimana Peran pemerintah Desa Aman damai dalam membina Moral Remaja ?

jawab: kita berikan dukungan dari sisi moral dan juga ada bantuan material. kita juga selalu libatkan mereka dalam setiap kegiatan di desa ini untuk melatih mereka sebagai generasi penerus agar mau peduli dengan desa ini.

2) Apa wujud kegiatan-kegiatan remaja di Desa Aman Damai?

Jawab: umumnya remaja disini mengikuti kegiatan Remaja Mesjid, Karang Taruna, Pengajian dan keagamaan, dan mereka sering bantu-bantu kita dalam setiap kegiatan di desa ini, misalnya kalo di balai desa ada acara baik dihadiri oleh kecamatan dan kabupaten.

3) Siapa saja yang terlibat dalam pembinaan moral remaja?

Jawab: aparaturnya pemerintah desa, para guru, ulama dan tentu saja orang tua, semuanya harus saling mendukunglah, kan demi anak-anak kita juga

4) Apa wujud bantuan pemerintah Desa dalam pembinaan moral remaja?

jawab: kita berikan penyuluhan seperti bahaya narkoba dan sex bebas, kita minta sama kecamatan dan kabupaten untuk datang ke desa, kadang juga ada dari kabupaten kayak BNN dan Kantor sosial yang memang mau ada penyuluhan untuk remaja, ya monggo, kita dukung dan fasilitasi. ada juga pelatihan keterampilan untuk bisa mandiri dan menambah penghasilan

- 5) adakah program khusus bagi pembinaan moral remaja di Desa Aman Damai khususnya dalam RPJMDes, RKPDes dan dituangkan dalam APBDes?

Jawab: yang jelas dalam Musrenbang kita undang semua, termasuk remaja mesjid dan karang taruna, jadi kalo mereka mau usul apa semua kita berikan kesempatan. nah, dalam pembangunan desa kan ada program pemberdayaan, itu kita arahkan memang untuk pembinaan generasi muda seperti penyuluhan moral dan pendidikan keterampilan seperti beternak ikan, jahit, bengkel, bordir, sablon dan lain-lain

- 6) Bagaimana Prestasi Generasi Muda di Desa Aman Damai?

Jawab: banyak, ada di tingkat nasional, kita juga punya potensi orang-orang kreatif yang berprestasi di bidang teknologi tepat guna pertanian, bahkan tingkat nasional pun. kalo remaja mesjid kita arahkan mengikuti MTQ, festival nasyid, marhaban dll di tingkat kecamatan dan kabupaten.

II. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Pemerintah Desa dalam pembinaan moral remaja di Desa Aman Damai Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.

1) Apa saja yang menjadi masalah dalam pembinaan moral remaja di Desa Aman Damai?

Jawab: *yang paling bahaya Narkoba, ini yang kita takutkan sama pergaulan bebas, terus kans ekarang banyak yang suka internetan, pengaruh buruk juga banyak dari situ kayak pornografi*

2) Apakah SDM aparatur pemerintah desa mampu mengatasi masalah tersebut?

Jawab: *jujur saja, kita tidak bisa sendiri, semuanya saling dukunglah, orang tua, guru, tokoh agama dan masyarakat harus mau peduli dengan anak-anak kita ini*

3) Apakah dukungan dari pemerintah desa telah mencukupi?

Jawab: *kita upayakan untuk terus tingkatkan, kita kerjasama dengan semua pihak agar remaja ini menjadi generasi penerus yang handal bagi desa inio, bagi daerah dan bagi bangsa dan negara ini*

4) Apa yang menjadi Faktor Pendukung dalam pembinaan Moral Remaja?

Jawab: *kepedulian semua pihak, alhamdulillah kita di desa ini mudah berkomunikasi dan kerjasama dengan orang tua, tokoh*

agama, guru dan organisasi remaja mesjid, jadi sejauh ini kami rasakan remaja kita di desa ini pada umumnya baik-baik.

- 5) Apa yang menjadi Faktor Penghambat bagi pembinaan Moral Remaja?

Jawab: seperti yang saya katakan tadi, internet dan budaya asing membawa pengaruh buruk bagi remaja, adanya faham-faham terorisme dan pornografi itu yang harus sama-sama kita waspadai

